

KOLOM SI KLERK**PEGAWAI NEGERI**

Berlakunya Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dirinya termasuk dalam perekrutan pegawai. Beberapa daerah telah melakukan penerimaan pegawai untuk mengisi formasi sesuai dengan bentukan organisasi baru mereka.

Pemberlakuan UU tersebut juga telah membuat daerah seakan berlomba dalam membentuk dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Namun terkadang pembentukan lembaga tersebut juga sering terlalu dipaksakan, sehingga dianggap membebani daerah tersebut. Apalagi jika daerah bentukan tersebut, relatif baru. Seperti yang terjadi terhadap beberapa daerah, yang mencoba merubah statusnya menjadi kabupaten/kota yang baru dan terkadang secara finansial dianggap belum memadai.

Terlepas dari semua hal tersebut, bentukan organisasi baru ini juga ternyata memerlukan tambahan pegawai baru. Walaupun di sisi lain jumlah pegawai negeri dianggap terlalu banyak. Misalnya Pemerintah Propinsi DKI akan memensiunkan dini sebanyak 21.000 orang pegawainya.

Perekrutan pegawai baru di beberapa daerah pada era otonomi saat ini, ternyata tidak berbeda seperti penerimaan pegawai sebelumnya. Namun demikian kelihatannya penerimaan saat ini dianggap lebih terbuka. Seperti biasanya juga, peminat terhadap lapangan kerja pegawai negeri ini juga sangat banyak. Dalam seleksi kali ini pemerintah daerah juga melibatkan pihak ketiga untuk menyeleksi calon pegawainya. Artinya penerimaan dianggap lebih netral dan bersih, walaupun suara sumbang tetap ada. Dengan demikian diharapkan dari perekrutan yang sekarang akan muncul para pegawai negeri yang profesional. Harapan tersebut dicetuskan oleh Wakil Presiden Hamzah Haz, dalam acara pertemuan dengan peserta Diklatpim Lembaga Administrasi Negara. Beliau setuju jika profesionalisme dan prestasi menjadi ukuran utama dalam mengangkat pejabat, guna mencapai apa yang disebut dengan good governance. Namun demikian perlu diimbangi dengan sistem penggajian yang memadai. Wapres menyangsikan profesionalisme yang ingin dicapai bila tidak diimbangi dengan sistem penggajian yang memadai hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Menjadi profesional atau tidak, minat menjadi pegawai negeri tetap menjadi dambaan banyak orang di Republik ini. Gaji kecil memang mungkin tidak perlu dijadikan alasan untuk tidak menjadi profesional, namun demikian usaha pemerintah untuk memperbaiki sistem penggajian pegawai negeri juga perlu segera direalisasikan. (Dayat Hidayat).